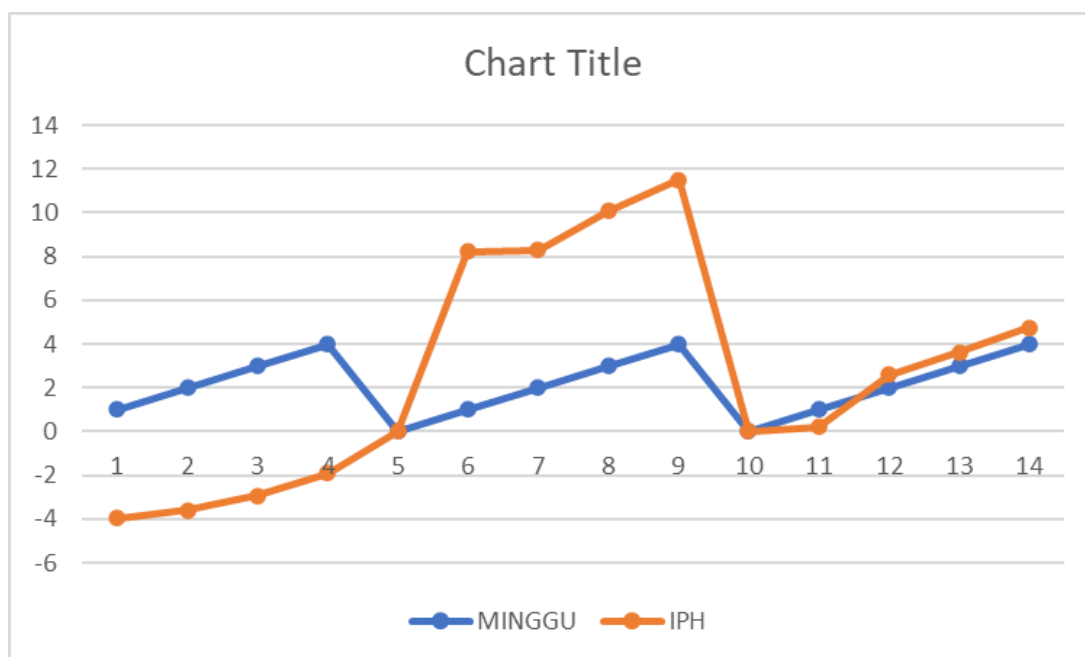


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

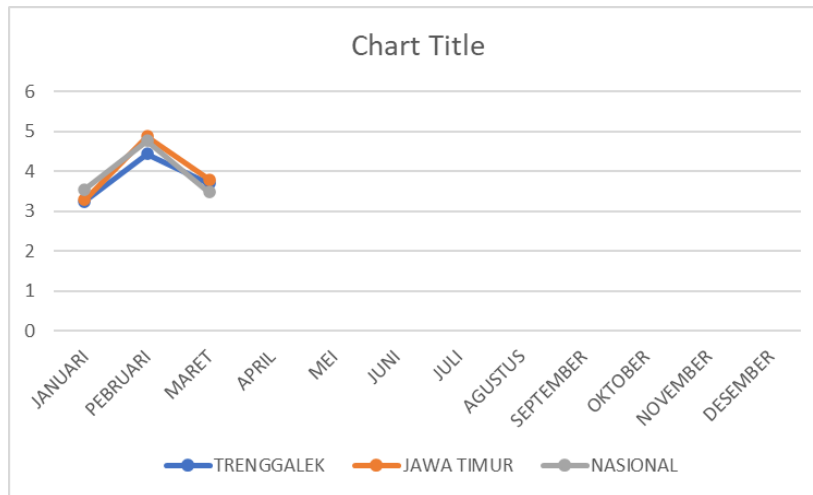
### Gambaran Umum Inflasi Kabupaten Trenggalek

TPID Kabupaten Trenggalek bekerjasama dengan Diskomidag Kabupaten Trenggalek telah melakukan pemantauan harga di pasar, serta aktif memantau perkembangan harga pasar melalui aplikasi *siskaperbapo* Provinsi Jawa Timur. Berikut data komoditas harga bahan pokok di Kabupaten Trenggalek bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Indek Perkembangan Harga kabupaten Trenggalek selama Tribulan I bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 mengalami fluktuasi dan yang mengalami kenaikan signifikan adalah cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah dan daging ayam ras. Berikut data perkembangan IPH selama Tribulan I



untuk perkembangan inflasi selama Tribulan I bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 adalah sebagai berikut



## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan dapat mempengaruhi inflasi di Kabupaten Trenggalek khususnya di sepanjang triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

1. Gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H;
2. Naik nya harga komoditas cabai rawit;
3. Digitalisasi UMKM perlu dukungan dari Pemerintah Daerah;
4. eningkatnya tren tingkat konsumsi masyarakat di bulan Ramadhan;
5. Momen menjelang liburan Ramadhan dan Idul Fitri 2026;
6. Komponen bergejolak volatile food khususnya komoditas cabai;
7. Berkembangnya online market dan touchless payment perlu adanya fasilitas teknologi yang mendukung pelaku usaha kecil untuk menghadapi persaingan;

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Trenggalek

rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Trenggalek, membahas perkembangan inflasi bersama OPD terkait diantaranya :

1. Dinas Pertanian Dan Pangan
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
3. Dinas Sosial dan PPPA
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas PUPR
8. Dinas Peternakan dan Perikanan
9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Bagian Kesra Sekretariat Daerah
13. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- Rapat Koordinasi pengendalian inflasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan melalui aplikasi *zoom meeting* selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026.

- TPID Kabupaten Trenggalek melakukan pemantauan harga ketersediaan pasokan komoditas dengan melakukan sasaran pemantauan pasokan dan harga pangan di 14 Kecamatan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026. hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu menyediakan hasil analisis harga dan pasokan pangan secara periodik sebagai bahan perumusan kebijakan di pusat dan daerah pemantauan pasokan dan harga pangan melibatkan petugas enumerator di tingkat produsen dan pedagang di 14 kecamatan, serta pemantauan harga secara berkala di aplikasi *siskaperbapo* Provinsi Jawa Timur;
  - Kegiatan Operasi Pasar kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perum Bulog Sub Divre Tulungagung ( Gudang Bulog Trenggalek.
- 
- Operasi Pasar Minyakita yang dilaksanakan di Pasar Basah Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2026. Minyakita distribusi dari Bulog diperuntukkan ke pedagang sejumlah 90 karton untuk 18 pedagang masing-masing mendapatkan 5 karton dengan harga beli dari bulog per karton Rp.174.000,- per karton isi 12 peace dan per peacenya seharga Rp.14.500,- sedangkan pedagang menjual ke konsumen seharga Rp. 15.700,- per liter (peace) sesuai HET.
  - Tanggal 4 Februari 2026 jumlah 100 karton untuk 20 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 5 karton
  - Tanggal 10 Februari 2026 jumlah 100 karton untuk 20 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 5 karton
  - Tanggal 19 Februari 2026 jumlah 100 karton untuk 20 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 5 karton
  - Tanggal 24 Februari 2026 jumlah 420 karton untuk 21 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 20 karton
  - Tanggal 4 Maret 2026 jumlah 440 karton untuk 22 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 20 karton
  - Tanggal 11 Maret 2026 jumlah 440 karton untuk 22 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 20 karton
  - Tanggal 17 Maret 2026 jumlah 440 karton untuk 22 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 20 karton
  - Tanggal 30 Maret 2026 jumlah 440 karton untuk 22 pedagang minyak yang ada di pasar dan masing-masing pedagang mendapatkan 20 karton

- Dinas pertanian dan pangan melakukan pembinaan kepada kelompok tani agar pengelolaan, pengolahan dan pengembangan cadangan pangan agar dapat optimal. Untuk mendukung pengelolaan lahan pertanian agar menjadi lebih produktif, tidak hanya dibutuhkan pembinaan SDM dari kelompok tani saja, namun sekaligus dari bibit / benih unggulan, penyuluhan teknis dan pendampingan petani, penguatan kelembagaan kelompok tani dan sarana-prasarana lainnya yang mendukung dalam rangka surplus hasil pertanian dan meningkatkan cadangan pangan daerah. Kegiatan pengembangan tanaman pangan dalam rangka pengembangan cadangan pangan serta kegiatan pengadaan beras cadangan pangan daerah bekerjasama dengan bulog untuk mendukung kegiatan TPID
- Pemantauan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida oleh tim Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida sangat mendukung kelancaran dalam penyaluran pupuk dan pestisida kepada petani dan kelompok tani, serta meminimalisir penyalahgunaan dan distribusi yang tidak tepat sasaran. monitoring ketersediaan bahan pangan pokok dipantau oleh satgas ketahanan pangan dan melaporkannya secara berkala ke satgas ketahanan pangan pusat.
- Monitoring dan evaluasi ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, legalitas pupuk non subsidi dan di beberapa distributor, pengecer dan kios di kecamatan oleh tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida ( KP3 ) untuk memantau ketersediaan pupuk serta mendukung peningkatan hasil pertanian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida serta Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2001 tentang pupuk budidaya tanaman, pemantauan distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan di beberapa distributor di 14 wilayah kecamatan pada bulan Januari sd Maret 2026;
- Peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Dinas PUPR dalam upaya mendukung kelancaran jalur distribusi dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Trenggalek. pada bulan Januari s.d Maret 2026 dilaksanakan pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan dan jembatan di beberapa trase yang menghubungkan antar wilayah Kecamatan;

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendukung TPID selama triwulan I tahun 2026 sangat efektif dalam mengendalikan inflasi di daerah, baik kelompok pangan dan non pangan. berikut program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek selama triwulan I tahun 2026

1. Operasi pasar bekerjasama dengan Bulog;
2. Sidak kelayakan makanan dan minuman di pasar dan toko retail;
3. Operasi pemantauan jalur distribusi komoditas pasokan pangan;
4. Operasi pemantauan dan penertiban angkutan barang;
5. Pemantauan harga dan kecukupan pasokan beras dan komoditas pangan secara langsung ke sejumlah pedagang di pasar dan penyalur beras Bulog gudang Trenggalek Sub Divre Tulungagung di Kabupaten Trenggalek;
6. Monev pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian modern;

- Pengawasan terhadap gudang dan tempat produksi pangan daerah;
9. Pengembangan dan Pemanfaatan data statistik *siskaperbapo* berbasis IT dalam bentuk data *dashboard* sebagai dasar pemantauan dan penentuan kebijakan harga komoditas pangan;

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama TPID Kabupaten Trenggalek selama triwulan I Tahun 2026 sangat efektif dalam menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali, sebagai bentuk dukungan pada kegiatan pengendalian inflasi kedepan, TPID Kabupaten Trenggalek merekomendasikan beberapa hal dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi, diantaranya :

**Penguatan Kelembagaan**

- Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja TPID Kabupaten Trenggalek;
- Meningkatkan intensitas kegiatan TPID
- Arahan dan pemantauan kepada distributor dan reseller bahan pokok terutama beras maupun bahan pokok utama lainnya untuk memastikan harga tetap stabil;
- Melaksanakan rapat koordinasi dan antisipasi gejolak harga menjelang Hari Besar Keagamaan.

**Produksi, Distribusi, Dan Konektifitas**

- Memantau perkembangan harga dan kecukupan stok komoditas pangan utama, khususnya minyak goreng, beras, telur, bawang merah, bawang putih dan cabai;
- Meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah melalui kemitraan berkelanjutan dengan memfasilitasi kerjasama antar daerah melalui optimalisasi peran swasta dan BUMD ataupun antara TPID Kabupaten Trenggalek dengan TPID di Kota / Kabupaten lainnya;
- Meningkatkan infrastruktur perdagangan antara lain revitalisasi sarana dan prasarana pasar baik pasar modern maupun tradisional;
- Meningkatkan sarana dan prasana jalan serta pemeliharaan jalan untuk mendukung distribusi dan konektifitas.

**Aspek regulasi dan *monitoring***

- *Monitoring* rutin perkembangan harga melalui sidak / pemantauan harga pasar dan *dashboard* aplikasi *siskaperbapo.com*;
- Optimalisasi pemanfaatan informasi dan data dalam rangka mengelola dan melakukan intervensi terhadap komoditas yang bergejolak;

**Pengelolaan ekspektasi**

- Menghimbau kepada OPD terkait untuk mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten

Trenggalek melalui program dan kegiatan di opd masing - masing untuk menjaga ekspektasi masyarakat.